

**BIAYA-BIAYA DAN PENDANAAN PENDIDIKAN:
KECENDERUNGAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN**

Ade Rukmana¹

Amirullah²

Izudin Hasan³

Aprilliantoni⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Alamat e-mail : ade_rukmana@unismabekasi.ac.id¹,
amirullah@unismabekasi.ac.id², izudin_hasan@unismabekasi.ac.id³,
aprilliantoni@unismabekasi.ac.id⁴

ABSTRACT

This study examines the dynamics of educational costs and funding, focusing on trends and policy impacts over the past five years at both global and national levels. Using a descriptive qualitative approach and literature analysis, the research identifies three major findings. First, the global and national education sectors face increasing financial pressure due to rising educational costs and fiscal instability, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Second, households experience a growing financial burden as direct and indirect education expenses continue to rise, contributing to widening disparities in access and learning opportunities. Third, although government budget allocations such as Indonesia's 20% education mandate provide an important foundation for education financing, challenges remain regarding equitable and effective distribution, particularly due to regional fiscal disparities and variations in school management capacity. The study concludes that improving the quality and equity of education requires not only adequate funding but also strengthened governance, targeted budgeting, and sustainable financing strategies to ensure that all learners receive quality educational services.

Keywords: education financing, education policy, education costs, equity, public expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika biaya dan pendanaan pendidikan dengan menyoroti kecenderungan serta dampak kebijakan dalam lima tahun terakhir pada tingkat global dan nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, sektor pendidikan menghadapi tekanan finansial yang meningkat akibat kenaikan biaya pendidikan dan ketidakstabilan fiskal, terutama setelah pandemi COVID-19. Kedua, rumah tangga mengalami beban biaya yang semakin besar karena peningkatan biaya langsung maupun tidak langsung, sehingga memperlebar kesenjangan akses

dan kesempatan belajar. Ketiga, meskipun alokasi anggaran pemerintah termasuk amanat 20% anggaran pendidikan di Indonesia memberikan dasar pendanaan yang kuat, tantangan tetap muncul dalam hal pemerataan dan efektivitas distribusi, khususnya akibat disparitas fiskal antar daerah dan variasi kapasitas manajemen sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan tidak hanya membutuhkan kecukupan pendanaan, tetapi juga penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, serta strategi pendanaan yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: pendanaan pendidikan, kebijakan pendidikan, biaya pendidikan, pemerataan, belanja publik

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan suatu bangsa. Sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan berperan menyiapkan individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis sekaligus menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Karena itu, pendanaan pendidikan menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan. Dalam kerangka global, komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG 4) menggarisbawahi pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu sepanjang hayat, dan untuk mencapainya dibutuhkan

sistem pendanaan yang kuat, efisien, dan berkeadilan (UNESCO, 2021).

Namun demikian, berbagai studi internasional lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan pendanaan pendidikan tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi yang cepat, serta dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak negara mengalami pengetatan fiskal sehingga berdampak pada alokasi anggaran pendidikan (World Bank, 2022). Pada masa pandemi, beberapa negara mencatat penurunan belanja publik riil untuk pendidikan meskipun kebutuhan intervensi remedial dan dukungan teknologi pembelajaran meningkat signifikan (UNESCO, 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara

kebutuhan pembelajaran dan kapasitas fiskal pemerintah, yang pada jangka panjang dapat menghambat pencapaian target SDG 4.

Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga. Biaya tersebut tidak hanya mencakup uang sekolah atau sumbangan pendidikan, tetapi juga berbagai biaya tambahan seperti transportasi, akses internet, perangkat digital, kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan belajar. Di banyak negara, biaya-biaya ini menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibanding pendapatan rumah tangga, sehingga memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah (OECD, 2023). Ketimpangan akses ini memiliki implikasi serius terhadap mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan belajar.

Di sisi lain, bantuan internasional untuk pendidikan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan bagi negara berpendapatan rendah justru mengalami stagnasi. Meskipun berbagai lembaga internasional

menegaskan pentingnya investasi pendidikan untuk pembangunan jangka panjang, porsi bantuan global untuk pendidikan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir (UNESCO & Global Education Monitoring Report, 2021). Kondisi ini memperdalam kesenjangan pembiayaan (*financing gap*), sehingga negara-negara dengan kapasitas fiskal lemah menghadapi risiko semakin tertinggal dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, dinamika pendanaan pendidikan juga dipengaruhi oleh meningkatnya peran aktor non-negara. Perkembangan sekolah swasta, lembaga filantropi, serta penyedia layanan pendidikan berbasis digital atau berbasis pasar telah memperluas pilihan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko komersialisasi pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, pemerataan, serta bagaimana peran negara dalam mengatur dan menyeimbangkan kontribusi sektor swasta agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan pendidikan (UNESCO, 2020). Dalam konteks tertentu,

dominasi pasar dalam penyediaan layanan pendidikan dapat memperdalam kesenjangan jika tidak disertai regulasi dan kebijakan kompensatoris yang memadai.

Di Indonesia, amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan merupakan salah satu komitmen fiskal terbesar di kawasan. Meskipun demikian, tantangan utama pendanaan pendidikan tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaan dan pemerataannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan di Indonesia masih digunakan untuk belanja pegawai, sementara belanja yang secara langsung berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan sarana pembelajaran masih relatif kecil (World Bank, 2021). Selain itu, disparitas anggaran antar daerah masih besar sehingga berdampak pada ketimpangan mutu layanan pendidikan antarwilayah (Kemdikbudristek, 2022).

Tidak hanya itu, data lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren

peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga. Biaya seragam, buku, transportasi, hingga gawai pembelajaran semakin membebani keluarga berpendapatan rendah, terutama pada masa pandemi ketika pembelajaran jarak jauh memerlukan akses internet dan perangkat digital (BPS, 2023). Kondisi ini meningkatkan risiko putus sekolah atau menurunnya partisipasi pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Berkaca pada berbagai dinamika tersebut, kajian mengenai biaya-biaya dan pendanaan pendidikan menjadi sangat penting. Analisis yang komprehensif mengenai kecenderungan pembiayaan, struktur biaya pendidikan, serta dampak kebijakan pendanaan diperlukan untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan dan pemerataan pembiayaan pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola pendanaan, tantangan fiskal, serta konsekuensi sosial dari kebijakan yang ada, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif,

berkeadilan, serta menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai biaya-biaya pendidikan, sumber pendanaan, serta kecenderungan dan dampak kebijakan pendanaan dalam konteks pendidikan nasional dan global. Pendekatan ini dipilih karena isu pendanaan pendidikan bersifat multidimensional dan tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka, tetapi juga melalui interpretasi terhadap konteks sosial dan kebijakan (Creswell, 2020). Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, laporan resmi lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan World Bank, serta dokumen pemerintah terkait anggaran pendidikan dalam lima tahun terakhir (World Bank, 2021; UNESCO, 2022; OECD, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran

sumber-sumber kredibel dari basis data akademik dan situs resmi lembaga kebijakan, kemudian data diseleksi berdasarkan prinsip relevansi, kekinian, dan validitas informasi (Miles & Huberman, 2020). Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan utama terkait pendanaan pendidikan dan implikasi kebijakan yang dihasilkan (Bengtsson, 2020). Proses analisis dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi secara tematik, serta penarikan kesimpulan yang berorientasi pada temuan substantif untuk menjawab fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai publikasi, data statistik pemerintah, dan laporan lembaga internasional agar hasil analisis lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Patton, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika biaya dan

pendanaan pendidikan dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik pada level internasional maupun nasional. Pada level global, berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memengaruhi stabilitas pendanaan sektor pendidikan. UNESCO (2022) menegaskan bahwa banyak negara mengalami penurunan kapasitas fiskal, sementara kebutuhan untuk memperkuat layanan pendidikan justru meningkat. Hal ini menciptakan tekanan ganda: negara harus memulihkan kehilangan pembelajaran (*learning loss*) sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan pendidikan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. World Bank (2023) juga mencatat bahwa negara berpendapatan rendah dan menengah merupakan kelompok yang paling terdampak karena ruang fiskal mereka relatif kecil, sehingga kebijakan penghematan anggaran sering terjadi pada sektor pendidikan.

Selain tekanan fiskal, kecenderungan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung rumah tangga menjadi salah satu temuan utama penelitian ini. Kenaikan biaya

langsung seperti uang sekolah, seragam, dan perlengkapan belajar diikuti oleh meningkatnya biaya tidak langsung seperti akses internet, transportasi, dan perangkat digital yang semakin dibutuhkan dalam proses pembelajaran modern (BPS, 2023). Fenomena ini terutama mengemuka selama dan setelah masa pembelajaran jarak jauh. OECD (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan digital menjadi salah satu faktor yang memperdalam disparitas akses pendidikan, terutama bagi peserta didik dari keluarga berpendapatan rendah atau daerah terpencil. Peningkatan beban biaya rumah tangga ini menciptakan risiko penurunan partisipasi sekolah, meningkatnya angka putus sekolah, serta berkurangnya kemampuan siswa dalam mengakses layanan pendukung pembelajaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa intervensi pendanaan dari luar negeri mengalami stagnasi dan tidak mengalami peningkatan berarti. UNESCO & GEM Report (2021) menunjukkan bahwa bantuan internasional untuk pendidikan sejak 2018 hanya meningkat pada tingkat minimal dan tidak mampu menutup

kesenjangan pendanaan global. Hal ini berdampak besar pada negara berkembang yang masih bergantung pada proyek internasional untuk pembiayaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas guru, atau program kualitas lainnya. Minimnya peningkatan bantuan juga menunjukkan bahwa isu pendidikan masih belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembiayaan global pascapandemi.

Dalam konteks nasional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kendati Indonesia memiliki komitmen alokasi 20% APBN untuk pendidikan, efektivitas penggunaan anggaran tersebut belum optimal. World Bank (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan masih terserap pada belanja pegawai, terutama gaji guru dan tenaga kependidikan, sementara porsi belanja modal untuk peningkatan kualitas sarana prasarana relatif kecil. Ketimpangan belanja pendidikan antar daerah juga menjadi masalah tersendiri. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi lebih mampu mendanai program pendidikan yang inovatif dan berkualitas, sementara daerah

dengan PAD rendah harus bergantung pada transfer pusat, yang sering kali tidak cukup untuk menangani kebutuhan lokal secara komprehensif (Kemdikbudristek, 2022).

Dari sisi kebijakan, penelitian menemukan bahwa berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), memiliki peran penting dalam meringankan beban operasional sekolah. Namun, efektivitas dana BOS dinilai masih belum seragam antar sekolah. Sekolah di daerah yang minim sumber daya sering mengalami kesulitan dalam memanfaatkan dana secara optimal akibat keterbatasan kapasitas manajemen, keterlambatan penyaluran, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dan formula pembiayaan BOS (Setiawan, 2021). Di sisi lain, kebijakan bantuan kepada siswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dinilai membantu mengurangi beban biaya, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi penargetan, pembaruan data penerima, serta pengawasan penggunaan dana (Suryadarma, 2020).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pendanaan yang terlalu cepat atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Beberapa daerah melaporkan perlunya kebijakan pendanaan yang lebih stabil, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal agar sekolah dapat merencanakan program peningkatan mutu secara jangka panjang (Kemdikbudristek, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Bengtsson (2020) yang menekankan bahwa efektivitas pendanaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, transparansi, dan tata kelola anggaran.

Penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa tantangan pendanaan pendidikan mencakup tiga isu penting, yaitu kecukupan anggaran, pemerataan pendanaan, dan efektivitas kebijakan dalam mengurangi beban biaya rumah tangga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ketidacukupan anggaran publik dapat memperlambat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,

sementara ketidakmerataan pendanaan menyebabkan sekolah dan daerah dengan keterbatasan fiskal semakin tertinggal. Efektivitas kebijakan pendanaan sangat menentukan daya ungkit terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya strategi pendanaan pendidikan yang lebih terarah, berbasis kebutuhan, serta memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam rangka memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika biaya dan pendanaan pendidikan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tantangan yang semakin kompleks baik di level global maupun nasional. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan biaya pendidikan yang berimbas langsung pada beban rumah tangga, terutama melalui biaya langsung dan tidak langsung yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, kemampuan negara dalam menyediakan pendanaan pendidikan

yang memadai belum sepenuhnya stabil, terutama akibat tekanan fiskal dan perubahan kondisi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pendidikan dan kapasitas pemerintah, yang berdampak pada penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah memenuhi komitmen alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi persoalan utama. Pola pendanaan yang lebih banyak terfokus pada belanja rutin, terbatasnya belanja modal untuk pengembangan mutu, serta ketimpangan pendanaan antar daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Program-program bantuan seperti BOS dan KIP memberikan kontribusi positif dalam meringankan beban sekolah dan peserta didik, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala terkait akurasi sasaran, kapasitas pengelolaan, serta kesesuaian besaran pendanaan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan

kualitas dan pemerataan pendidikan tidak hanya membutuhkan peningkatan besaran anggaran, tetapi juga penguatan efektivitas, ketepatan sasaran, dan tata kelola pendanaan. Tanpa perbaikan komprehensif dalam aspek-aspek tersebut, kesenjangan akses dan mutu pendidikan berpotensi semakin melebar. Oleh karena itu, strategi pendanaan pendidikan ke depan perlu lebih berorientasi pada pemerataan, efisiensi, serta keberlanjutan, agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2021). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications.

Jurnal

Bengtsson, M. (2020). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 6(2), 1–8.

Setiawan, A. (2021). Evaluasi pelaksanaan dana BOS dalam peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(1), 45–62.

Suryadarma, D. (2020). Efektivitas bantuan pendidikan KIP dalam mendukung keberlanjutan sekolah. *Journal of Social Policy Studies*, 18(3), 112–129.

OECD. (2023). Education financing inequality among OECD countries. *OECD Education Working Papers*, 312, 1–29.

Peraturan Pemerintah / Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Laporan & Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Rapor Pendidikan & Evaluasi Pendanaan Pendidikan Daerah*. Jakarta: Kemdikbudristek.

UNESCO. (2020). *Education Finance Trends Report*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report: Non-State Actors in Education*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2022). *Education in a Post-COVID World*. Paris: UNESCO.

UNESCO & Global Education Monitoring Report Team. (2021). *Aid to Education: Trends and Analysis*. Paris: UNESCO.

OECD. (2023). *Education at a Glance 2023*. Paris: OECD Publishing.

World Bank. (2021). *Indonesia Public Expenditure Review: Education Sector*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2023). *Education Finance Watch 2023*. Washington, DC: World Bank.

